

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, 2008

Adnan Buyung Nasution, dkk.2007 *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*. Jakarta: LBH Jakarta.

M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jilid I*, Pustaka Kartini, Penerbit Buku Bermutu, Jakarta, 1985

Winata, Frans Hendra. 2006. *Advokat Indonesia, Citra Idealisme dan Keprihatinan*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta

Sinaga, V. Harlen, *Dasar-Dasar Advokat*, Jakarta;Erlangga.2011.

Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia Pustaka utama, 2009,

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007

Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Misalnya Indonesia dan Malaysia dua bangsa serumpun, tetapi dipisahkan dalam sistem hukumnya oleh masing-masing penjajah, yaitu Belanda dan Inggris. Akibatnya, meskipun kita telah mempunyai KUHAP hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri, namun sistem dan asasnya tetap bertumpu pada sistem Eropa Kontinental (Belanda), sedangkan Malaysia, Brunei,*

Rian Pangestu, Penerapan Pasal 22 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Perkara Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Btm), 2017

UIB Repository (c) 2017

*Singapura bertumpu kepada sistem Anglo Saxon*. Edisi Kedua Sinar Grafika, Jakarta, 2008

H.W.R. Wade, *Administrative law*, Oxford, UK, 1984 hlm. 22-24 sebagaimana ter kutip dalam Marwan Effendy, dalam bukunya *Kejaksaan : Posisi Dan Fungsinya Dari Perpektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2005

## B. PERUNDANG-UNDANGAN

KUHP

KUHAP

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 42 tahun 2013 Tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak